

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Abra Emy Hajar, “Pemilu Serentak di Indonesia (Antara Original Intent dan Implementasi)”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Ed. 1, Oktober, 2019.
- Admin, “Novin Gagal Dilantik jadi Anggota DPRD Sulsel, Ini Penyebabnya”, *Jernih, Cepat dan Baru, Update Kareba*, September 2019. <https://updatekareba.com/novin-gagal-dilantik-jadi-anggota-dprd-sulsel-ini-penyebabnya/>
- Aksi Informasi, Mengapa Politik Uang Tak Bisa Dihilangkan di Masa Pemilu?, Pusat Edukasi Anti Korupsi, Februari 2024 <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240213-mengapa-politik-uang-tak-bisa-dihilangkan-di-masa-pemilu>
- Amal Ichlasul, 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi)*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- American Association For The International Commission Of Jurists, 1985, *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. New York.
- Anriani, “Pemecatan Legislatif Terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh DPD PDI Perjuangan”, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Ari Aprian, “Alexius Beberkan Cerita Pemberhentian dari PDI-P”, Januari 2020, <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/1462711550/alexius-akim-beberkan-cerita-pemberhentian-dari-pdip>.
- Aryani & Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana : Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Aspinall Edward, dkk, 2015, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, PolGov, Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2019, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Jakarta. Konstitusi Press.

- Budiardjo Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat*, Mirzan, Bandung.
- Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia, Jakarta.
- Budiarti Aisyah Putri, 2018, *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Catt Helena, et.al, 2014, *Electoral Management Design*, International IDEA, Swedia.
- Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- Dahl Robert A., 2001, *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Eep Saefulloh Fatah, “Gejala Partai Mengambang,” *Kompas*, 18 November 2006.
- Ellwin Warsito dan Subagyo Hari, 2011, *Konstituen Pilar Utama Partai Politik*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta.
- Fahmi Khairul, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3, Mei, 2016.
- Fajr Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatah Eep Saefulloh, 2000, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru: Masalah dan Masa Depan Demokrasi Terpimpin Konstitusional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- G. Schmidt Manfred, 2002, *Democracy Theory: A Comparative Introduction*, New York: Routledge.
- Gaffar Janedjri M., Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1, Maret, 2013.
- Gunawan Hendra, “Dipecat Gerindra Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPRD Sulsel, Misriani Ilyas Menggugat ke PN Jaksel, *Tribunnews.com*, November 2019. <https://www.tribunnews.com/regional/2019/11/26/dipecat-gerindra-sebelum-dilantik-jadi-anggota-dprd-sulsel-misriani-ilyas-menggugat-ke-pn-jaksel>

Haedar M. Iqbal Maulana, “Syarat Penggantian Calon Anggota Legislatif Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Prinsip Demokrasi”, Universitas Hasanuddin, 2021.

<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13452/>

Hakim Rakhmat Nur, “Langkah Gerindra Pecat Ervin Luthfi untuk Digantikan Mulan Jameela disebut Sewenang-wenang”, *Jernih Melihat Dunia*, Kompas.com, September 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/15155941/langkah-gerindra-pecat-ervin-luthfi-untuk-digantikan-mulan-jameela-disebut>

Haris Syamsuddin, 2014, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Indirwan dan Agus Riwanto, “Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antar-Waktu (Recall) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat”, *Res Publica*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2021.

Ifah Noor, “Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo Pada Pemilu 2014”, *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2*, September 2020.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Ishiyama John T., 2013, *Ilmu Politik Jilid 1 Dalam Paradigma Abad Ke-21*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Isra Saldi dan Fahmi Khairul, 2021, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*, Rajawali Pers., Depok.

Isra Saldi, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Nasional*, Maret, 2019.

Jafar Muhammad, “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, *Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 10, No. 6, September, 2017.

Jurdi Syarifuddin, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim Kemandirian dan Penguatan Etika Penyelenggara”,

Electoral Research Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Maret, 2020.

Kartawidjaja Pipit R. dan Kusumah Mulyana W., 2003, *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, Closs dan 7 Strategic Studies, Jakarta.

Katz Richard S., dan Crotty William, 2015, *Handbook Partai Politik*, Nusamedia, Bandung.

Kelsen Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media, Jakarta.

Keputusan KPU-RI Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU-RI Nomor 1381/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu 2019.

Kumara Qori Mughni, “Menjamin Kepastian Hukum Calon Terpilih Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019”, *Electoral Research KPU*, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Desember, 2020.

Kusnadi Moh. dan Ibrahim Harmally, 1980, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

Labolo Muhadam dan Ilham Teguh, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Lehoucq Fabrice, 2003, “Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences”, *Annual Review*.

Lutfi Mustafa, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pulihnya Hak Politik Eks PKI”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, Juli 2004.

Manan Bagir dan Harijanti Susi Dwi, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2003.

Marijan Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Mauludi, 2020, *Undang-Undang Pemilihan Umum*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Ma'shum Saifullah, 2012, *DPR Terhormat DPR Dihujat: Refleksi Lima Tahun di DPR Periode 2004-2009 (Catatan Sejarah Sang Wakil Rakyat)*, Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta.
- Michelman Frank I., "The Constitution, Social Rights, And Liberal Political Justification", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, Januari, 2003.
- Mietzner Marcus, "*Business as Usual? The Indonesian Armed Forces and Local Politics in the Post-Soeharto Era*" dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy, 2003, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- Munte et al., "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Panwas Kota Pematangsi)", *USU Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, Januari 2017.
- Najah Safinatun, "Status Hukum Calon Anggota Legislatif Terpilih yang Ter-Recall oleh Partai Politik", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, Desember, 2019.
- Nazriyah R., "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)", *Jurnal Hukum, Edisi Khusus*, Vol. 18, Oktober 2011.
- Noor, Firman, 2015, *Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respon Terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia*, RMBooks, Jakarta.
- Nurtjahjo Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85.
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101.
- Pitkin Hanna F., 1967, *The concept of Representation*, University of California Press, London.
- Prinsip-Prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984). *Unofficial Translation*, Diterjemahkan dari oleh Asep Mulyana (Peneliti Komnas HAM).

- Purwati Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Putra Dio Siaga dan Anzorullah, “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Judicial Review terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang”, *Jurnal Of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1, Jambi 2022.
- Putra Hendrasyah, 2020, “Manipulasi Pemilu dalam Proses Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekdau Tahun 2015”, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2.
- Putri Budiarti Utami, “Caleg Ini Cerita Dipecat PDIP Karena Dituduh Manipulasi Suara”, *Bicara Fakta*, Tempo.Co, Januari 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1296397/caleg-ini-cerita-dipecat-pdip-karena-dituduh-manipulasi-suara>
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 33-PKE-DKPP/III/2020
- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 330-PKE-DKPP/XI/2019
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3776 K/Pdt/2021
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/2021
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 PK/Pdt/2022
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-XX/2022
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-I/2003
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-XI/2013
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 881/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor 137/G/2019/PTUN.Mks
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 182/B/2020/PTTUN.Mks

- Rahardjo Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ramadhanti Ria, “Partai Politik Dan Demokrasi”, *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, Vol. 16, No. 3, September, 2018.
- Rauf Maswadi, “Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan”, *Jurnal Politika*, Vol. 2, 2006.
- Rochmawanto Munif, “Pembagian Kekuasaan Antara MPR, DPR Dan DPD Dalam Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berkedaulatan Rakyat”, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2014.
- Romli Lili, “Mencari Format Sistem Kepartaian Masa Depan”, *Jurnal Politika*, Vol. 2, 2006.
- Rosando Abraham Ferry, “Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”, *Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2014.
- Salabi Amalia, “Penggantian Caleg Terpilih oleh Partai, Inkonsistensi Sistem Pemilu”, Indonesia Election Portal, Rumah Pemilu, Oktober 2019.
<https://rumahpemilu.org/penggantian-caleg-terpilih-oleh-partai-inkonsistensi-sistem-pemilu/>
- Salang Sebastian, 2007, *Potret Partai Politik di Indonesia: Asesmen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian*, Friedrich Naumann Stiftung, Jakarta.
- Saragih Bintang R, 1985, *Lembaga Perwakilan dan Pemilu di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Sardini Nur Hidayat, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Silaen Hendrik, “Gagal Dilantik Malah Dipecat, Caleg DPRD Maluku Terpilih Gugat Partai Gerindra, 14Kompasiana, November 2019.
<https://www.kompasiana.com/hendrik-silaen2000/5dccd8af097f366af02b53d2/gagal-dilantik-malah-dipecat-caleg-dprd-maluku-terpilih-gugat-partai-gerindra>
- Sinapoy Muh. Sabaruddin dan Sanib Safril Sofwan, “Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu : Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *HOLREV*, Vol. 3, No. 2, September 2019.
- Sjafrina Almas Ghaliya Putri, “Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik”, *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol.5, No. 1, Juni 2019.

- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sorensen Georg, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prosepek dalam Dunia yang Sedang Berubah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardjono Maria SW., 2021, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: Bahan Kuliah*, Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Surbakti Ramlan, et al., 2011, *Memaksimalkan Derajat Keterwakilan Partai politik dan Meningkatkan Akuntabilitas Calon Terpilih*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Surbakti Ramlan, 2015, *Peta Permasalahan Dalam Keuangan Politik Indonesia*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum (Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu), *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)*. Publications Office, International IDEA, SE 103 34 Sdtockholm, Sweden.
- Tanjung Titony, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024”, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, Februari 2023.
- Taufik Mohammad, “Politik Lokal: Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Di Kalimantan Timur Tahun 2018-2020”, *Paradigma*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2020.
- Tricahyo Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Transh Publishing, Malang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah dicabut dengan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

USAID, 2008, *Hubungan Dengan Konstituen: Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik*, National Democratic Institute, Washington.

Wajono Padmo, 1999, *Ilmu Negara*, Cet. Kedua, Ind-Hill-co, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.